



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Utara No 7-8 Jakarta Pusat Telepon (021) 3453510  
www.kemendagri.go.id / otda.kemendagri.go.id

Nomor : 100.2.7/3410/OTDA  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Undangan Narasumber

Jakarta, 3 Mei 2023  
Yth.Bapak/Ibu (Daftar Terlampir)  
di -  
Tempat

Melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan untuk pencapaian target kinerja Kementerian Dalam Negeri, akan dilaksanakan pertemuan koordinasi dalam rangka asistensi penyusunan rekomendasi LKPJ tepat waktu, pada:

hari : Selasa  
tanggal : 23 Mei 2023  
waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai  
tempat : Yuan Garden Hotel, Jl. Pintu Air V No.53 Pasar Baru, Jakarta Pusat .

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir sebagai Narasumber. Untuk konfirmasi kesediaan dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Billy Telp 081295349331 dan Sdri. Dwi Setia Eka Nomor Telp 081392647786.

Demikian untuk maklum, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal  
Otonomi Daerah  
Plh. Sekretaris Direktorat  
Jenderal Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Plh.Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah  
Suryawan Hidayat, ST  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 196705071999031001

Tembusan:  
Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Lampiran Undangan Narasumber

Nomor : 100.2.7/3410/OTDA

Tanggal : 3 Mei 2023

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan	Materi
1.	DR. Taufik Alwi Ketua Lembaga Kerjasama Antar Lembaga Universitas IPWI Jakarta	Narasumber	Rekomendasi DPRD sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.
2.	Sekwan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Narasumber	Peran Sekretaris Dewan dalam penyusunan Rekomendasi DPRD
3.	Sekwan DPRD Kabupaten Jembrana	Narasumber	Strategi penyusunan dan penyampaian Rekomendasi DPRD Tepat Waktu (hambatan dan tantangan)



**UNIVERSITAS IPWIJA**

SK Kemendikbudristek RI No. 627/E/O/2022

Jl. H. Baping No.17 Kel. Susukan, Kec. Ciracas

Jakarta Timur. 13750 Telp. 021-22819921

E-mail : [contact@ipwija.ac.id](mailto:contact@ipwija.ac.id) <https://ipwija.ac.id>

 UNIVERSITAS IPWIJA

No. : 056/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2023  
Perihal : Narasumber, Pendamping dan Pemberi Materi  
Lampiran : -

Kepada Yth.  
Suryawan Hidayat, ST.  
Plh. Sekretariat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah  
Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Otonomi Daerah No.100.2.7/3410/OTDA tanggal 3 Mei 2023, yaitu akan diadakannya kegiatan dan perihal tersebut di atas dengan ini Kepala LP2M Prodi Manajemen Universitas IPWIJA menugaskan:

Taufik, SE., MM. (NIDN :0310037303)

Untuk menjadi Narasumber dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Selasa, 23 Mei 2023  
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Yuan Garden Hotel Jl. Pintu Air V No 53 Pasar Baru, Jakarta Pusat  
Tema : “Rekomendasi DPRD Sebagai Tolak Ukur Keberhasilan Pembangunan Daerah.”

Setelah pelaksanaan kegiatan Dosen yang ditugaskan diwajibkan membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada pemberi tugas (LP2M Universitas IPWIJA). Mohon bantuan penanggungjawab kegiatan membantu menyediakan berkas yang diperlukan untuk pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 15 Mei 2023



**Rochmad Fadjar Darmanto, S.E., M.M.**  
Kepala LP2M Prodi Manajemen



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3450038  
Fax (021) 3453566 [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id) , Email: asosda\_hal\_otda@yahoo.com

Nomor : 29 / KDPH / W11. V / Vm1 / 2023  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Ucapan Terima kasih

Jakarta, 23 Agustus 2023  
Yth. Rektor Universitas IPWIJA  
di -  
Jakarta

Bersama ini kami mengucapkan terima kasih kepada: Dr. Taufik Alwi, SE,MM (Dosen Universitas IPWIJA Jakarta) yang telah berperan sebagai salah satu narasumber pada Hari Selasa, 23 Mei 2023 Pukul 09.00-12.00 WIB, mengenai "Rekomendasi DPRD sebagai Tolok Ukur Keberhasilan Pembangunan Daerah" pada kegiatan pertemuan Koordinasi dalam rangka asistensi penyusunan rekomendasi LKPJ tepat waktu, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, bertempat di Yuan Garden Hotel, Jl. Pintu Air V No. 53 Pasar Baru, Jakarta.

Demikian keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagai mana perlunya.



Analisis Kebijakan Ahli Madya Wilayah V,  
Direktorat Fasilitas Kepala Daerah  
dan DPRD

Raden Sartono, S.Si, MM  
NIP. 196501211996031001  
Pembina Tk. I / (IV/b)



**REKOMENDASI DPRD  
SEBAGAI TOLOK UKUR  
KEBERHASILAN  
PEMBANGUNAN DAERAH**

Dr. Taufik Alwi, S.E., M.M.

Disampaikan pada Pertemuan Koordinasi  
dalam rangka Asistensi Penyusunan Rekomendasi LKPJ Tepat Waktu,  
Ditjen Otda Kemendagri R.I., Jakarta 23 Mei 2023

# Dasar Hukum LKPJ:

- **UU Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintah Daerah, Pasal 67: Kepala Daerah Wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- **PP Nomor 13 Tahun 2019** tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- **Permendagri No. 86 No. 2017**, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- **Permendagri Nomor 18 Tahun 2020** tentang peraturan pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

# Penyusunan dan Penyampaian LKPJ (PP 13/2019 dan Permendagri 18/2020)

- Kepala Daerah Menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.
- LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Perencanaan dan anggaran tahunan
- Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam Rapat Paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir
- Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara , LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada DPRD dalam Rapat Paripurna
- Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada DPRD dalam rapat paripurna

# Bagi Legislator

Dibutuhkan **Metodologi** untuk menemukan hal-hal yang **tidak tercapai** dari **Komitmen Pemda** dalam menjalankan Visi dan Misi

- LKPJ sebagai tools/instrumen melakukan cross check capaian dalam indikator yang dirumuskan dalam **RPJPD** dan **RPJMD**
- LKPJ sebagai tools melakukan cross check terhadap **konsistensi RKPD**
- LKPJ sebagai tools melakukan cross check, bagaimana capaian-capaian/kesepakatan dalam **APBD** Murni maupun APBD Perubahan
- Bagaimana menganalisis postur 3 hal penting dalam APBD yaitu: **Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan**



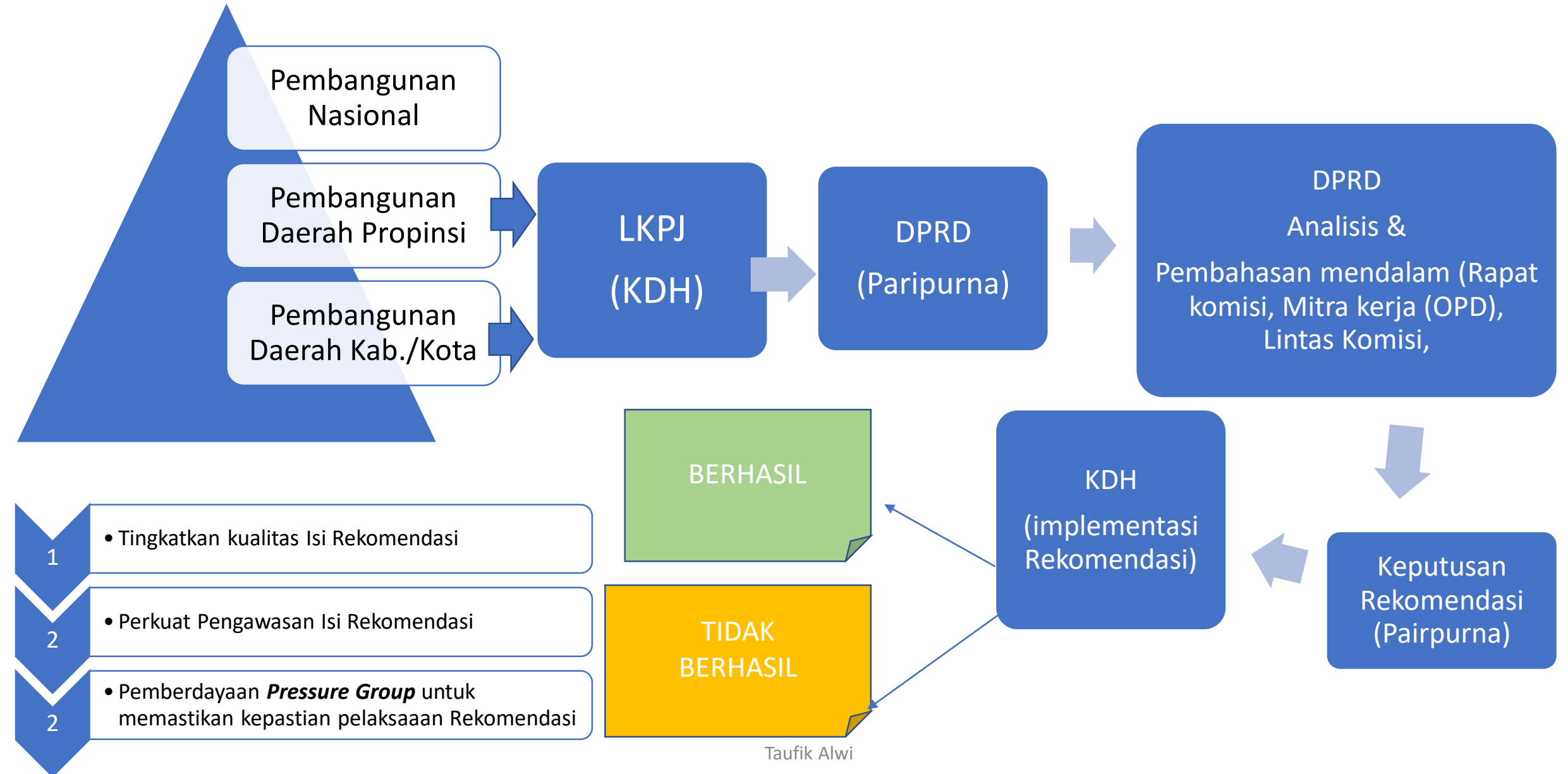
# LKPJ ditolak DPRD?

- DPRD tidak punya kewenangan untuk Menolak
- Tetapi melalui **Kajian/Analisis/** disertai **konsultasi** dan **pembahasan** yang mendetail mengenai Bagaimana capaian indicator-indicator Program yang dirumuskan oleh Kepala Daerah dan seluruh OPDnya menjadi alat penting (**essential instrument/tools**) bagi DPRD dalam rangka menginterupsi Kinerja Pemerintah Daerah tentang capaian-capaian dalam 1 tahun Anggaran.
- Karena pada sisi lain, DPRD memiliki Kewenangan untuk melakukan Pengawasan dan Persetujuan Anggaran

# Hal Penting terkait Rekomendasi DPRD

- Idealnya bersifat Tegas
- Idealnya mampu Menunjukkan adanya upaya yang **konsisten** dilakukan oleh Pemda untuk memperbaiki kinerjanya di tahun-tahun yang berikut.
- Panitia Khusus (Pansus) DPRD selain mengompilasi hasil pembahasan dari masing-masing komisi, juga melakukan pengembangan pembahasan yang intensif kemudian disusun menjadi rekomendasi DPRD

# Rekomendasi LKPJ dari DPRD menjadi Tolok Ukur Keberhasilan Pembangunan Daerah



# Tolok Ukur Pemberian Rekomendasi atas LKPJ

- RPJPD, RPJMD, RKPD
- KUA dan PPAS
- RKA dan DPA SKPD
- Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
- Perda APBD dan Perda Perubahan

REKOMENDASI LKPJ BERHASIL BILA: kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun mendatang SEMAKIN BAIK.

Bila BELUM BAIK, maka:

- Tingkatkan kualitas isi Rekomendasi DPRD atas LKPJ
- Perkuat pengawasan atas tindak lanjut isi Rekomendasi
- Berdayakan kelompok penekan (*pressure group*) untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi

# Rekomendasi

- Sebagai upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam tataran kebijakan maupun teknis operasional
- Meliputi bidang penyelenggaraan administrasi publik, manajemen keuangan daerah, aspek tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
- Rekomendasi diakomodir dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun berikutnya.

Lingkungan  
EKSTERNAL  
(PESTLE)

Sinergi Perencanaan, Pencapaian dan Pendanaan

RKPD

RPJMD RPJPD RPJMN RPJPN

Continuous  
Improvement

WEWUJUDKAN  
TUJUAN  
PEMBANGUNAN

Sustainable  
Development  
Goals (SDGs)

MITRA  
STRATEGIS

KDH

Rekomendasi  
LKPJ

DPRD

Salah satu  
Aspek Krusial :  
Rekomendasi  
DPRD terkait  
LKPJ

Sekretariat  
Dewan

Lingkungan  
INTERNAL

Visi Pembangunan 2005-2025  
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

PENTAHAPAN PEMBANGUNAN  
RPJPN 2005 – 2025





# DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

( Pasal 263 & Pasal 264 UU No. 23/2014)

**RPJPD** merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk **20 (dua puluh)** tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.

Ditetapkan dengan **PERDA**, paling lama **6 (enam)** bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda ttg RPJPD dan RPJMD anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

**RPJMD** merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu **5 (lima)** tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Ditetapkan dengan **PERDA**, paling lama **6 (enam)** bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik

**RKPD** merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu **1 (satu)** tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

ditetapkan dengan **Perkada**

Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

# Dinamika Lingkungan tidak bisa dilepaskan dalam meraih keberhasilan Pembangunan Daerah

Apakah Dinamika Lingkungan Internal dan Eksternal (Skala Lokal, Nasional, Internasional dan Global) berpotensi mempengaruhi Pembangunan Daerah ?

## PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TRIWULAN I-2021

Berita Resmi Statistik No. 36/05/Th. XXIV, 5 Mei 2021

Y-ON-Y

**-0,74%**

Q-TO-Q

**-0,96%**

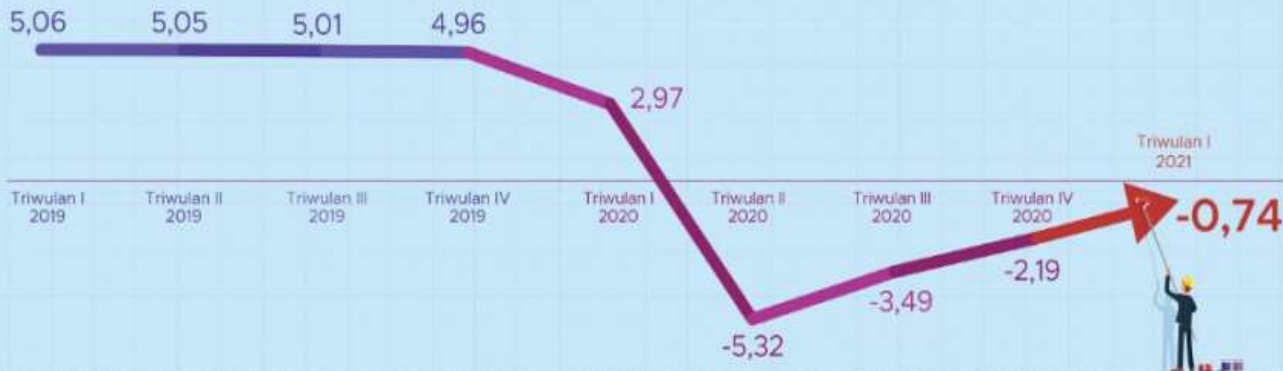
PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) HARGA BERLAKU

**Rp3.969,1 Triliun**



### PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) 2019-2021

(Y-ON-Y), (persen)



## World Economy to Trail Pre-Pandemic Trajectory for Years

Estimated global economic output (indexed to 2019, i.e. pre-pandemic levels)\*

- Pre-pandemic forecast (January 2020)
- Latest forecast (January 2021)



\* real GDP at 2010 prices  
Source: World Bank



## Global Phenomenon

*Indonesia* is one of the country which running **biggest decentralization in the world**, include **transfer** of **authority**, transfer of **budgeting**, and **moving government officials** from **central government to sub national government**.



# Peningkatan Efektifitas Rekomendasi LKPJ

Rekomendasi DPRD harus konstruktif:

- Berorientasi pada Tindakan Nyata dan Spesifik,
- Menyelesaikan masalah (*Problem Solving*)
- Dapat dilaksanakan dengan biaya yang memadai

Rekomendasi yang berupa **kegiatan** dimasukkan dalam KUA dan PPAS Perubahan APBD atau KUA dan PPAS APBD tahun anggaran berikutnya.

Isi Rekomendasi menjadi bagian Program Pengawasan DPRD.

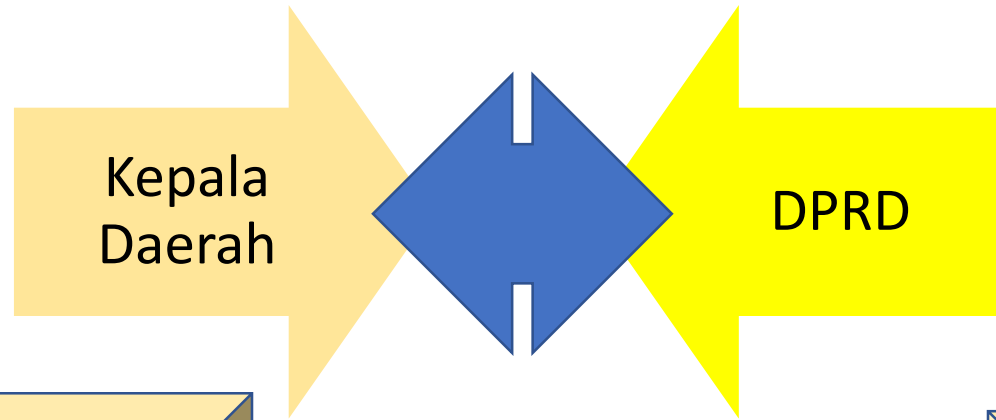
# Peningkatan Efektifitas Rekomendasi LKPJ

Daftar rekomendasi juga diberikan kepada komisi-komisi di DPRD agar pelaksanaannya dapat diawasi melalui rapat dengan SKPD yang menjadi mitranya.

DPRD melakukan press realease atas substansi rekomendasi yang dihasilkannya.

Rekomendasi berupa pemberian penghargaan atau pemberian teguran disampaikan secara spesifik, proporsional dan sesuai dengan lingkup kewenangannya dengan dilandasi oleh niat baik untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Mitra Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah  
dapat dijabatani Sekretariat Dewan termasuk dalam Rekomendasi LKPJ  
(Lingkungan Internal dinilai berperan)



Secara Administratif  
Bertanggungjawab  
Kepada Kepala  
Daerah melalui Sekda

SEKWAN menjembatani  
Harmoni Keselarasan  
Pemda dan DPRD

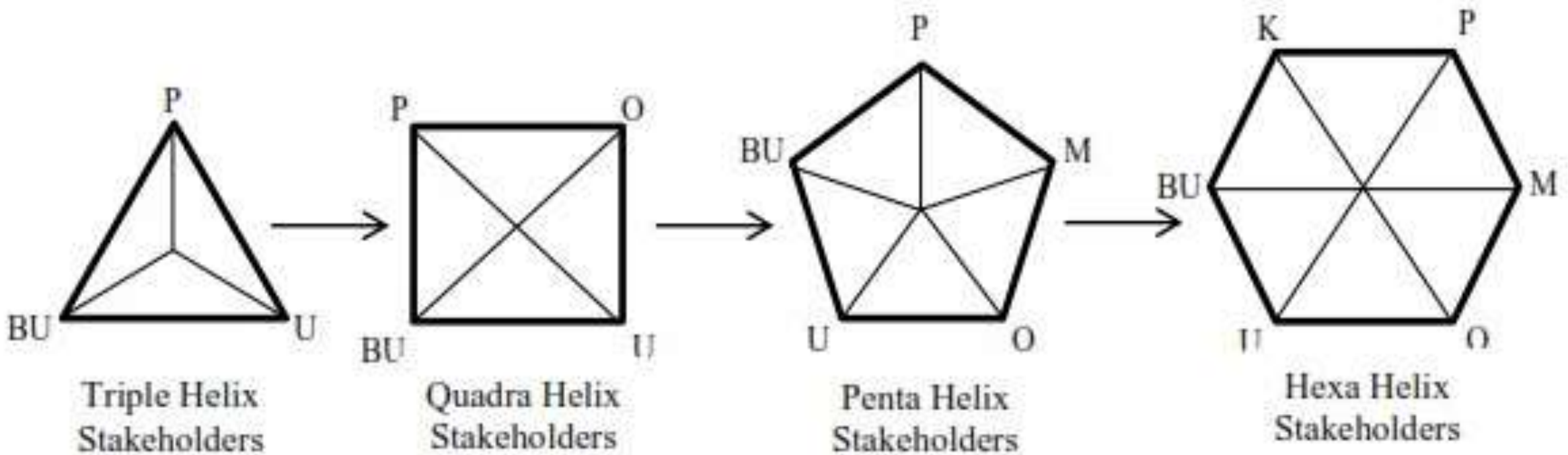
Kunci Mediasi,  
Mediator

Taufik Alwi

Secara teknis  
operasional  
bertanggungjawab  
kepada Pimpinan DPRD,  
  
Tidak  
melakukan Politik  
Praktis

# Rekomendasi LKPJ sangat Esensial

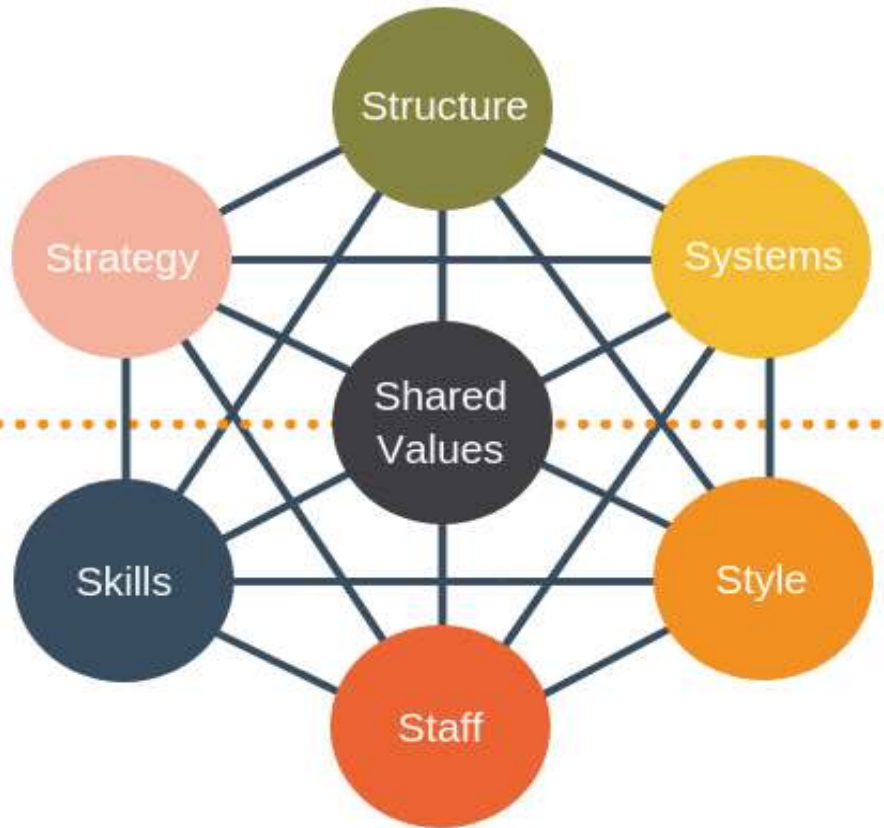
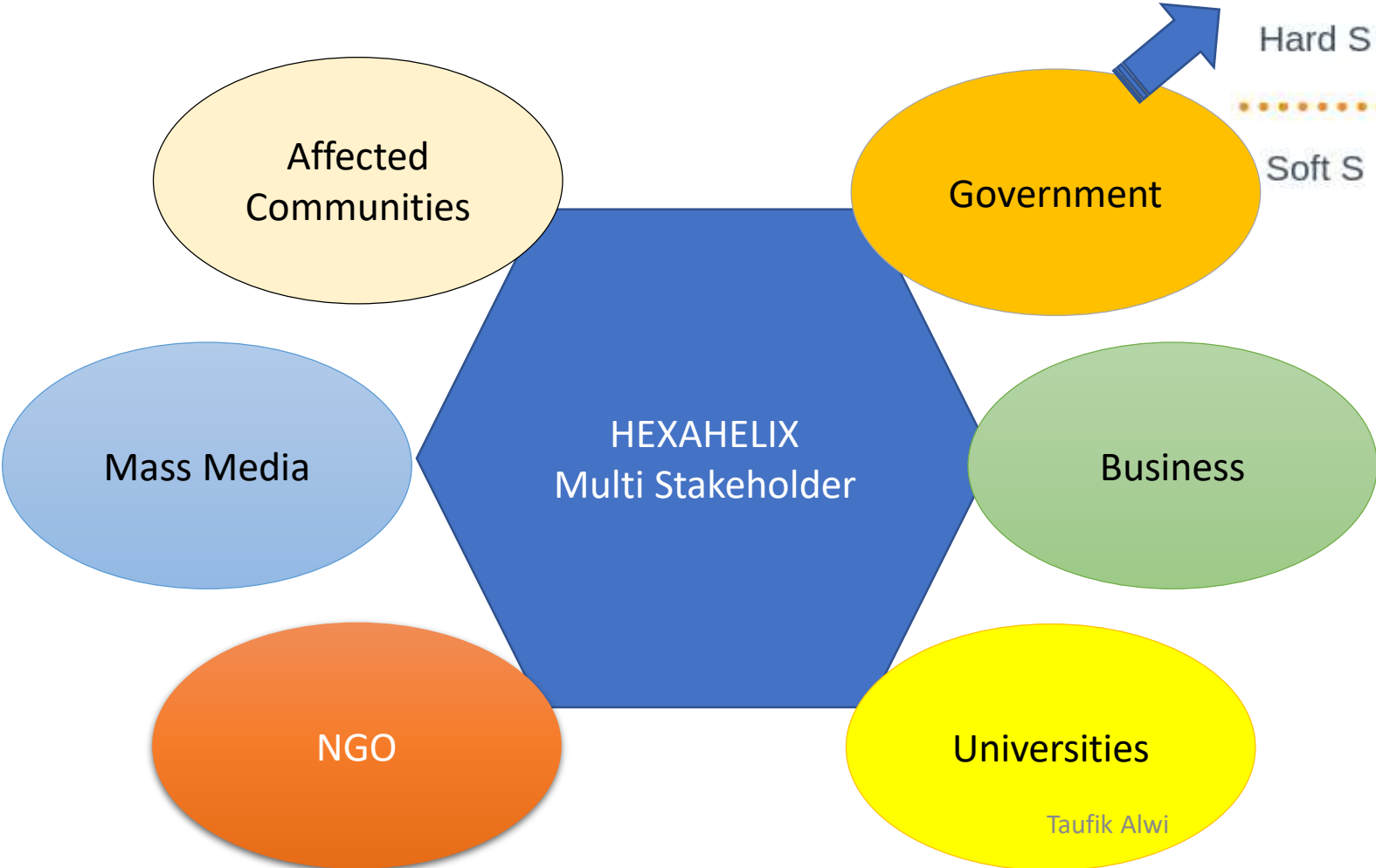
Bagaimanakah Permasalahan dan peran 7S pada Sekretariat Dewan dalam menjembatani KDH dan DPRD guna menyukseskan Rekomendasi LKPJ dan Implementasinya?



P	: Pemerintah
BU	: Badan Usaha
U	: Universitas
O	: Organisasi Non-Pemerintah
M	: Media Massa
K	: Komunitas Terdampak



# McKinsey 7S Framework

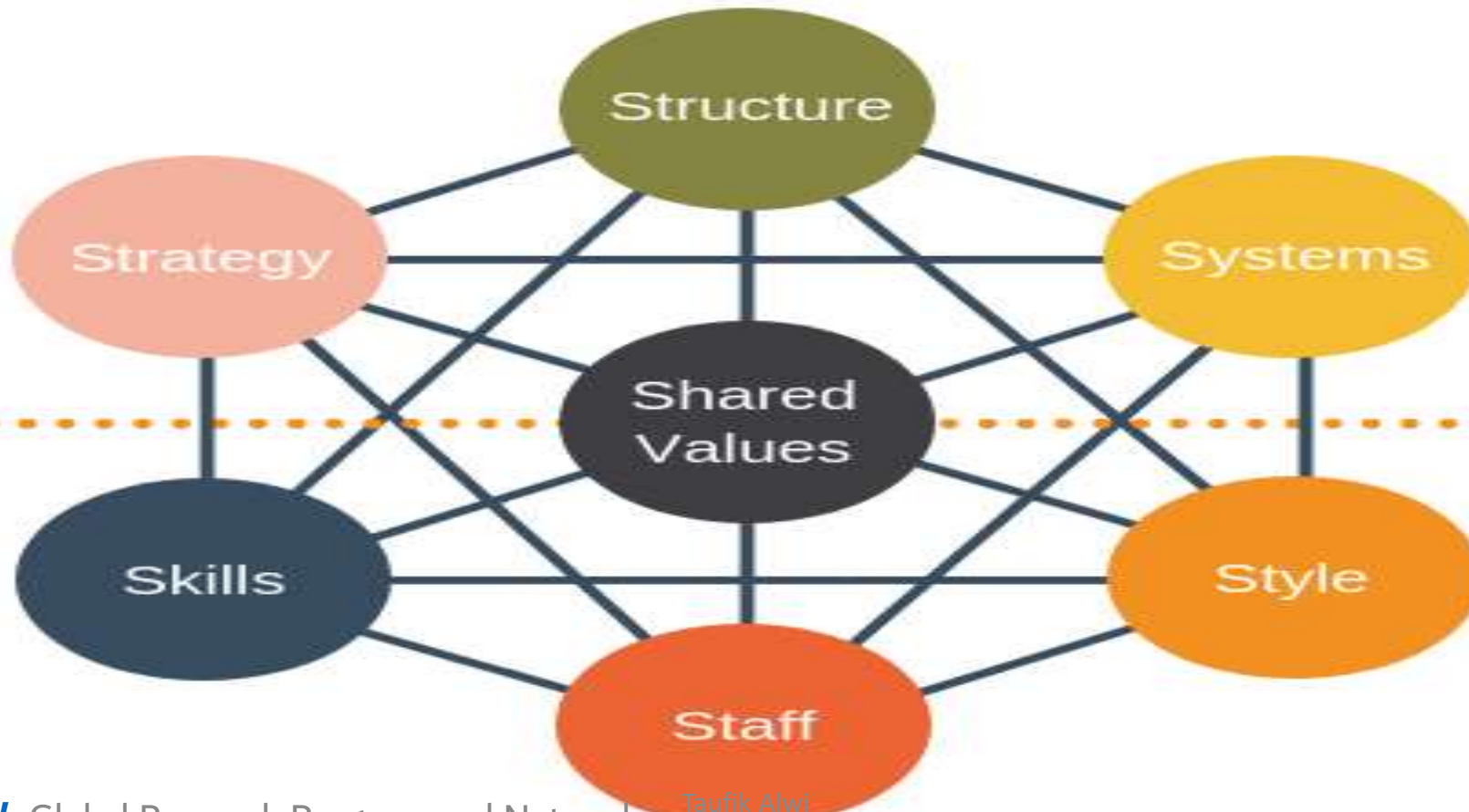


# Pembangunan Daerah berbasiskan Data yang Valid Reliabel

Data Statistik bisa bersumber dari:  
Badan Statistik Nasional (BPS),  
Sektoral (Kementerian/Lembaga Pemerintah),  
Statistik/ Lemabaga Penelitian Nasional/  
internasional yang kredibel

# Empowering dan Peningkatan Sinergisitas Lingkungan Internal Setwan dalam mendukung Rekomendasi LKPJ berbasis 7S McKinsey

## McKinsey 7S Framework



# Publication about 7S McKinsey

The results of studies in several previous studies state that internal organizational factors according to 7S McKinsey such as Strategy, Structure, System, Shared value, Skill, and Staff are very influencing each other which has an **impact** on the **performance of an organization**.

Suwanda; Nugroho, Bernardus Yulianto. (2022). Literature reviews: McKinsey 7S model to support organizational performance. *Technium Soc. Sci. J.*, 38, 1.

- The McKinsey 7sframework model was used as the study's framework and positivist research methodology was used throughout.
- Among county governments in the western Kenya region, there is a large and favorable correlation between strategic procurement planning and service delivery. The analysis suggests that county governments ensure that strategic sourcing strategies are fully implemented and that they are produced in a reasonable timeframe because they are essential for initiating service delivery.
- Kennedy Wandera Walubengo, Dr. Joseph Olang'o Abuya, Dr. Fredrick Njehu Kiongera, Strategic Procurement Planning and Service Delivery of County Governments in Western Kenya Region, *African Journal of Empirical Research*, Vol. 4 (Iss. 1) 2023, pp. 159-165

# Kendala-Kendala Dalam Penelaahan Dokumen LKPJ

Ketidaktahuan mengenai apa yang menjadi acuan penilaian;

Kriteria apa yang dijadikan pedoman untuk melakukan penilaian;

Ke arah mana fokus penilaian dilakukan;

Data/informasi apa selain yang disajikan dalam LKPJ yang masih diperlukan untuk melakukan penilaian; dan

Bagaimana menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian yang dilakukan

## Beberapa Kasus yang ditemukan terkait LKPJ



- Masalah target Penyampaian LKPJ tepat waktu oleh KDH
- Masalah pada Interval waktu Penyampaian Keputusan Rekomendasi LKPJ oleh DPRD
- Masalah pada Implementasi Rekomendasi oleh KDH

### BAGAIMANA UPAYA PEMBERDAYAAN INTERNAL SETWAN (terkait 7S Konsep)

Dalam Mendukung Kemitraan KDH dengan DPRD guna Mewujudkan SKPJ Tepat Waktu ?



# *Question & Opinion*

- Apa saja **Masalah** yang ditemukan pada **Aspek yang dipilih**, terkait Penyusunan LKPJ tepat waktu dan Implementasi SKPJ ?
- Apakah Aspek tersebut (salah satu 7S yang dipilih) esensial dalam kapasitas peran Sekretariat Dewan guna menjembati KDH dan DPRD terkait SKPJ?
- Apa Manfaat dan Solusi dari Aspek tersebut dalam peningkatan Kapasitas Setwan?



**Terima Kasih**



# Foto Kegiatan



# Foto Kegiatan



Taufik Alwi